



### TAJUK RENCANA

#### Mengendalikan Inflasi di DIY

**DIBANDING** pertumbuhan ekonomi, laju inflasi di DIY masih tergolong tinggi. Ada selisih cukup lebar antara pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,58 persen dengan inflasi yang mencapai 6,7. Tingginya inflasi ini antara lain dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya pangan. Karenanya, inflasi harus dikendalikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY.

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tidak terlepas dari kenaikan biaya operasional, seperti biaya transportasi dan sebagainya. Karenanya, dengan adanya subsidi ongkos kirim kepada distributor, diharapkan harga barang tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan pedagang atau pengecer. Bagaimanapun kenaikan harga BBM berkontribusi mendorong kenaikan inflasi di DIY.

Terkait hal itulah Gubernur DIY Sri Sultan HB X baru-baru ini secara simbolis memberikan subsidi ongkos kirim kepada distributor sebesar Rp 2.000 per kilogram. Subsidi ini akan berdampak positif terhadap pengendalian harga barang, khususnya komoditas pangan, yang sangat dibutuhkan masyarakat. Melalui pemberian subsidi ongkos kirim diharapkan harga barang di tingkat pedagang maupun pengecer tidak terlalu tinggi sehingga terjangkau masyarakat.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diharapkan berperan lebih optimal dalam mengawasi distribusi komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Sejauh ini, berdasar pantauan di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Kranggan dan Beringharjo, kenaikan harga barang masih dalam tahap wajar. Dalam kondisi seperti sekarang ini, apalagi menjelang Natal dan

Tahun Baru, wajar bila sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan secara fluktuatif, namun masih dalam batas kewajaran.

Hal yang harus diwaspadai adalah terjadinya penimbunan. Karena itu, TPID harus menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian untuk memantau kondisi di lapangan, dan segera mengambil tindakan tegas bila menemukan pelanggaran. Spekulasi menimbun barang tentu dengan harapan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Menjadi tidak keajaiban ketika barang di pasaran langka atau terbatas, namun ada orang menimbun barang dengan harapan ketika barang dijual harganya sudah melambung.

Pemerintah daerah bersama TPID perlu mewaspadai aksi penimbunan barang terutama menjelang akhir tahun dan libur Natal. Sebab, pada masa-masa tersebut, dipastikan kebutuhan masyarakat atas barang, terutama barang konsumsi, meningkat tajam, sementara ketersediaannya terbatas. Jika harga meroket, sementara ketersediaannya terbatas atau langka, maka situasinya bisa mengkhawatirkan.

„Jika kondisinya demikian, maka pemerintah harus mengambil langkah cepat agar harga terkendali, antara lain dengan menggelar operasi pasar (OP). OP ini hanya bersifat sementara dengan tujuan menyetabilkan harga. Sayangnya, dalam OP pun sering terjadi pelanggaran. Misalnya, orang yang sebenarnya tak berhak membeli, dengan berbagai cara tetap berusaha mendapatkannya. Akibatnya, tujuan OP menjadi tidak tercapai. Untuk itu, dalam OP harus ada pengawasan ketat, yakni pembeli adalah orang yang memang berhak.“ □-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005